



PEMERINTAH  
KOTA PADANG PANJANG

# **RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023**

(DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP)

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TRIWULAN II TAHUN 2022</b> .....	<b>6</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD.....	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.....	15
2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.3.1 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	19
2.3.2 Urusan Lingkungan Hidup .....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b> .....	<b>34</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang .....	39
3.3 Program dan Kegiatan .....	39
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b> .....	<b>42</b>
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>49</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam hal dianggap perlu, biasanya terkait dengan penyesuaian anggaran dan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan, OPD dapat menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja, yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu Indikatif berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Setelah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah maka Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai salah satu OPD yang membawahi 2 (dua) urusan wajib, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup, pada saat ini juga menyiapkan Perubahan Renja Tahun 2022 yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada penyesuaian kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Padang Panjang.

### **1.2. DASAR HUKUM**

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7); Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 ( Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 15).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Memastikan tercapainya prioritas pembangunan Tahun 2023 berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

**BAB I    Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**Bab II    Evaluasi Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**Bab III   Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
- 3.3 Program dan Kegiatan

**Bab IV    Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

**Bab V    Penutup**

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN**  
**DAN LINGKUNGAN HIDUP TRIWULAN II TAHUN 2022**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD**

Evaluasi Renja pada prinsipnya merupakan evaluasi untuk melihat tingkat capaian target sampai dengan Triwulan II. Dari program dan kegiatan Tahun 2023 yang telah sempat direalisasikan, apakah memenuhi target atau tidak, serta faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat capaian tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diputuskan apakah program kegiatan dimaksud perlu dilakukan perubahan/penyesuaian, baik dalam bentuk kegiatan, target dan anggaran yang dibutuhkan. Selanjutnya perlu diperhitungkan apakah kebutuhan tersebut dapat terpenuhi oleh kemampuan keuangan daerah yang ada saat ini.

Dengan mempertimbangkan gambaran sebagaimana tersebut diatas, maka Tabel 2.1. berikut ini disajikan untuk mengevaluasi tingkat capaian Renja 2023 sampai dengan Triwulan II dan rasionya terhadap target sampai tahun terakhir periode Renstra (Tahun 2023).

Dari Tabel dibawah dapat dilihat bahwa terdapat beberapa Sub Kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan target, diantaranya :

1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana, belum bisa dilaksanakan karena belum rekening di DPA nya belum by name by address.
2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, belum bisa dilaksanakan karena menunggu MoU dengan pihak Bank terkait pencairan dana nya.
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengeloan Keanekaragaman Hayati, pelaksanaannya belum sesuai target karena menyesuaikan jadwal dengan Tenaga Ahli.
4. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, pelaksanaan belum sesuai target karena menunggu petunjuk teknis dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sedangkan untuk indikator Sasaran dan Program, sebagian besar baru dapat dihitung pada akhir tahun 2023.

**Tabel 2.1.**  
**Evaluasi terhadap Hasil Renja**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2022**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kehidupan Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan( Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN									
01:04:02	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	100%	48,80%	73,59%	73,97%	101%	73,59%		
1.04.02.2.01	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
1.04.02.2.03	Penyusunan/Reviu/Legalisasi/Kebijakan Bidang PKP	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
1.04.02.2.05	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	20 kali	10 kali	10 kali	12 kali	120%	10 kali		
1.04.03.2.02	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	20 Kali	10 kali	10 kali	10 kali	83%	23 kali		
1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)	299 unit	52 unit	43 unit	40 unit	93%	105 unit		
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang direhab (APBD)	299 Unit	52 unit	43 unit	40 unit	93%	105 unit		
01:04:05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Persentase keter sediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	100%	86%	88%	88%	100%	86%		
1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran, Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman, Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan perkerasan), Persentase saluran drainase teknis (konstruksi beton)	2 kecamatan,	3 Jenis	2 kecamatan,11 lokasi sarana Jalan setapak, 13 DAM, 8 Drai nase	2 kecamatan,11 lokasi sarana Jalan setapak, 13 DAM, 8 Drai nase	100%	2 kecamatan,11 lokasi sarana Jalan setapak, 13 DAM, 8 Drai nase		

	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (PSU)	1. Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan, 11 lokasi sarana Jalan setapak, 13 DAM, 8 Drainase	2 kecamatan, 11 lokasi sarana Jalan setapak, 13 DAM, 8 Drainase	100%	2 kecamatan, 11 lokasi sarana Jalan setapak, 13 DAM, 8 Drainase		
		Jumlah Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan	39 lokasi		11 lokasi	11 lokasi	100%	39 lokasi		
		Jumlah Lokasi Permukiman yg dilengkai dengan Banguna Pengaman	27 lokasi		11 lokasi	11 lokasi	100%	27 lokasi		
		Jumlah Bangunan Drainase Lingkungan Permukiman	33 lokasi		8 lokasi	7 lokasi	88%	33 lokasi		
	<b>PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Presentase Permukiman layak Huni</b>	<b>97,90%</b>	<b>94,96%</b>	<b>95,24%</b>	<b>95,22%</b>	<b>100%</b>	<b>95,22%</b>		
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di Rehab dan Di Bangun	10 Unit		5 Unit	0 unit	100%	5 Unit		
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di Rehab dan di Bangun	10 Unit		5 Unit	0 unit	100%	5 Unit		
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Hunian Rusunawa yang di Kelola	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	100%	72 Hunian, 6 Orang		
	Sum Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Hunian Rusunawa yang di Kelola dan Jumlah Tenaga Harian Lepas yang Dibayarkan	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	72 Hunian, 6 Orang	100%	72 Hunian, 6 Orang		
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Rasio Rumah Layak Huni</b>	<b>95%</b>	<b>94,96%</b>	<b>95,24%</b>	<b>95,22%</b>	<b>100%</b>	<b>94,12%</b>		
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian	72 hunian	72 hunian	72 hunian	100%	72 hunian		
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian	72 hunian	72 hunian	72 hunian	100%	72 hunian		



	<b>PROGRAM BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DAN PEMBERDAYAAN KOMU NITAS PERMUKIMAN</b>	<b>Rasio Rumah Layak Huni</b>	<b>92,65%</b>	<b>94,96%</b>	<b>95, 24%</b>	<b>95,22%</b>	<b>100%</b>	<b>92,65%</b>		
	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Rusunawa	Jumlah Hunian Rusunawa yg di Kelola	72 Hunian	72 Hunian	72 Hunian	72 hunian	100%	72 Hunian		
	Kegiatan Penyusunan RP3KP	Jumlah Dokumen RP3KP	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen		
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen		
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW, Jumlah KLHS Perubahan RPJMD	3 dokumen	1 dokumen				2 dokumen		
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW	2 dokumen	1 dokumen				1 dokumen		
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah KLHS Perubahan RPJMD	3 dokumen	1 dokumen				1 dokumen		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)</b>	<b>Jumlah Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup</b>	<b>2 Jenis</b>					<b>2 Jenis</b>		
	Kegiatan Koordinasi Penilaian Adi Pura	Jenis Penilaian Adi Pura	2 Jenis					2 Jenis		
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pertemuan kader	12 kali					12 kali		

	Kegiatan Pengembangan Adiwiyata	Jumlah sekolah Adiwiyata	45 Sekolah					45 Sekolah		
	Kegiatan Keaneakara gaman Ekosisten dan Hayati ( KEHATI)	Jumlah Profil KEHATI Kota Padang Panjang	1 Dokumen					1 Dokumen		
	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jenis Data dan Informasi Lingkungan	5 Jenis					5 Jenis		
	Kegiatan Penyusunan DIKPLHD	Jumlah Dokumen DIKPLHD	1 Dokumen					1 Dokumen		
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan</b>	<b>32-29</b>	<b>28,57</b>	<b>28,57</b>	<b>28,57</b>	<b>100%</b>	<b>28,57</b>		
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis hasil Uji, Jumlah kampung iklim yg di Bina	2 jenis, 9 kampung iklim	2 Jenis( Air dan Udara)	2 jenis,6 kampung iklim	2 jenis,8 kampung iklim	100%	2 jenis,8 kampung iklim		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	9 kampung iklim	7 Kampung	8 kampung iklim	8 kampung iklim	100%	8 kampung iklim		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jenis hasil uji	2 jenis	2 jenis				2 jenis		
	Sub Kegiatan Pengelo laan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis hasil uji	2 jenis		2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis		
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Data kualitas lingkungan, Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	2 data, 1 sungai	1 data, 1 sungai	2 Data,1 sungai	2 Data,1 sungai	100%	2 data, 1 sungai		
	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Data kualitas lingkungan	2 data	2 data	2 data	2 data	100%	2 data		
		Jumlah Sungai yg diinventarisasi dan diawasi Sumber Pencemarnya	1 Sungai	1 Sungai	1 Sungai	1 Sungai	100%	1 Sungai		
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase Pemenuhan Mutu Air pada Tingkat Cemar Sedang</b>	<b>35-34</b>					<b>31</b>		
	DAK Bidang Lingkungan Hidup ( DAK Penugasan)	Jumlah Unit dan Jumlah Jenis Bantuan DAK	2 Unit					2 Unit		

	Pengujian Kualitas Lingkungan	Jenis Hasil Uji	2 Jenis					2 Jenis		
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terbunanya Kampung Iklim	5 Kampung Iklim					5 Kampung Iklim		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI ( KEHATI)</b>	<b>Presentase Ketersediaan Dokumen KEHATI</b>	<b>100%</b>		<b>66%</b>	<b>66%</b>	<b>100%</b>	<b>66%</b>		
		<b>Presentase Ketersediaan RTH Publik</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,30%</b>	<b>4,4%</b>	<b>4,23%</b>	<b>96%</b>	<b>4,23%</b>		
	Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Mutu Air pada Tingkat Cemar Ringan	2 Kecamatan, 2 Data		2 Kecamatan, 2 Data	2 Kecamatan	100%	2 Kecamatan		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Kehati, dan Jumlah Dokumen Data Monitoring KAHATI	1 Dokumen Monitoring , 1 Dokumen Rencana Pemanfaatan		1 Dokumen Monitoring , 1 Dokumen Rencana Pemanfaatan KEHATI	1 Dokumen Monitoring , 1 Dokumen Rencana Pemanfaatan KEHATI	100%	1 Dokumen Monitoring , 1 Dokumen Rencana Pemanfaatan KEHATI		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman yg dibangun dan jumlah taman yg terpelihara	8 lokasi dan 2 kecamatan		3 lokasi dan 2 kecamatan	3 lokasi dan 2 kecamatan	100%	3 lokasi dan 2 kecamatan		
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Presentase Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes ( Jmlh Fasyankes yg mengelola Limbah/Penghasil Limbah)</b>	<b>20-25</b>	<b>20-25</b>	<b>26-30</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>28</b>		
	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes ( Jmlh Fasyankes yg mengelola Limbah/Penghasil Limbah)	10 Fasyankes	10 Fasyankes	10 Fasyankes	10 Fasyankes	100%	20 Fasyankes		
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha/kegiatan penghasil LB3 yang dibina	20 Fasyankes	10 Fasyankes	10 Fasyankes	10 Fasyankes	100%	20 Fasyankes		
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Tingkat ketaatan penerapan Izin Lingkungan</b>	<b>65%</b>	<b>50%</b>	<b>60%</b>	<b>60,53%</b>	<b>101%</b>	<b>60,53%</b>		
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	110 Kegiatan	100 Kegiatan	105 Kegiatan	105 Kegiatan	100%	108 Kegiatan		
	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	105 Kegiatan	100 Kegiatan	105 Kegiatan	105 Kegiatan	100%	105 Kegiatan		
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>Tingkat Ketaatan terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	<b>31%</b>					<b>31%</b>		
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha/Kegiatan yg diawasi	90 Usaha/Kegiatan					90 Usaha/Kegiatan		
	Penyusunan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS	1 Dokumen					1 Dokumen		

	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Penyuluhan dan informasi Lingkungan Hidup</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan kader lingkungan, Jenis Data dan Informasi Lingkungan yang disajikan	12 kali pertemuan, 4 jenis	4 kali pertemuan	4 kali pertemuan, 2 Jenis	2 Jenis Data Informasi dan 3 kali pertemuan	83%	1 Jenis Data Informasi dan 10 kali pertemuan		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pertemuan kader lingkungan	16 kali pertemuan	4 kali	4 kali pertemuan	4 kali pertemuan	100%	7 kali pertemuan		
	Penyelenggaraan Kampanye Lingkungan	Jenis Data dan Informasi Lingkungan yg di sajikan	2 jenis		2 jenis Data dan Informasi Lingkungan	2 jenis Data dan Informasi Lingkungan	100%	2 jenis Data dan Informasi Lingkungan		
	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Penghargaan di bidang lingkungan hidup</b>	<b>2 jenis</b>	<b>0 jenis</b>	<b>2 jenis</b>	<b>2 jenis</b>	<b>100%</b>	<b>1 jenis</b>		
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Penilaian kebersihan lingkungan, Jumlah sekolah Adiwiyata	45 kali Pembinaan	0 jenis 40 sekolah	2 Jenis, 3 kali Koordinasi, 40 kali Pembinaan	4 kali Koordinasi, 40 kali Pembinaan	100%	45 kali Pembinaan, 2 Jenis		
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Jenis Penilaian kebersihan lingkungan	2 Jenis	0 jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis		
		2. Jumlah sekolah Adiwiyata	45 kali Pembinaan	40 sekolah	3 kali Koordinasi, 40 kali Pembinaan	4 kali Koordinasi, 40 kali Pembinaan	100%	4 kali Koordinasi, 85 kali Pembinaan		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga</b>	<b>72%</b>	<b>74%</b>	<b>73%</b>	<b>82,72%</b>	<b>88%</b>	<b>82,72%</b>		
		<b>Persentase Pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>26%</b>	<b>15,17%</b>	<b>58%</b>	<b>15,17%</b>		
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	-Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada -Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan -Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat - Jenis sarana prasarana persampahan Jumlah TPA yang dipelihara Jumlah lokasi penyediaan lahan untuk pengolahan sampah	185 orang, 25 kali ,penekagan perda 3 kali panganan lahan TPA 1 Unit, 1 dokumen 4 laporan	4 kali, 181 Orang, 1 TPA	2 laporan, 183 orang, 3 kali , 1 TPA	175 orang, 1 TPA	96%	175 orang, 1 TPA		
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Jastrada	4 laporan		2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan		
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan,	183 org	4 kali, 181 Orang, 1 TPA	183 orang	177 orang	97%	177 orang		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jenis Sarana prasarana persampahan (APBD)	3 jenis. 1 TPA	3 jenis ( pemeliharaan bak sampah kayu, beton dan kontainer)				2 jenis		
	Sub Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Sampah bagi Masyarakat	7 kali		3 kali	3 kali	100%	6 kali		

	Sub Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPATPST/SPA	Jumlah TPA yg terpelihara	1 TPA		1 TPA	1 TPA	100%	1 TPA		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja, laporan keuangan perangkat daerah	20 laporan					20 laporan		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja, laporan keuangan perangkat daerah	20 laporan					20 laporan		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN, Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran, Jumlah Laporan Prognosis	37 orang, 45 laporan		36 orang, 15 laporan	36 orang, 15 laporan	100%	36 orang, 30 laporan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg dibayarkan Gaji dan tunjangannya	37 orang		37 orang	36 orang	100%	36 orang		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	2 laporan		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	39 laporan		13 laporan	13 laporan	100%	26 laporan		
	Sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	2 laporan		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan komunikasi yang disediakan, jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan, Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah penggandaan yang disediakan, Jumlah makan dan minum yang disediakan, Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	63 jenis, 174 jenis, 2 gedung kantor, 36 jenis dan 29928 lembar, 3099 ok, 414 ok		21 jenis, 58 jenis, 2 gedung kantor, 12 jenis dan 9976 lembar, 1033 ok, 150 ok	14 jenis, 52 jenis, 2 gedung kantor, 19 jenis dan 8814 lembar, 143 ok, 40 ok	100%	21 jenis, 72 jenis, 2 gedung kantor, 12 jenis dan 16307 lembar, 2042 ok, 269 ok		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan komunikasi yang disediakan	21 jenis		18 jenis	18 jenis	100%	21 jenis		
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	58 jenis		72 jenis	72 jenis	100%	72 jenis		
		Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 gedung kantor		2 gedung kantor	2 gedung kantor	100%	2 gedung kantor		
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah penggandaan yang disediakan	12 jenis dan 29928 penggandaan		12 jenis dan 9976 penggandaan	12 jenis dan 2296 penggandaan	100%	12 jenis dan 16307 penggandaan		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum yang disediakan	3099 ok		1009 ok	1009 ok	100%	2042 ok		

		Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	414 ok		288 ok	288 ok	100%	269 ok		
	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atributnya	Jumlah pakaain Dinas yang diadakan	70 pegawai							
	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atributnya	Jumlah pakaain Dinas yang diadakan	70 pegawai							
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan, Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 unit, 5 jenis		6 unit, 3 unit	4 unit, 3 unit	67%	13 Unit		
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yg diadakan	8 unit							
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	9 unit		4 unit	4 unit	100%	6 Unit		
	Sub Kegiatan Pengadaan Pengadaan sarana dan perasarana pendukung gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 sarana		7 unit	7 unit	100%	7 unit		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tagihan jasa air, listrik, telepon yang dibayarkan, Jumlah tenaga harian lepas yang tersedia	104 rekening, 16 orang		36 rekening, 29 orang	36 rekening, 29 orang	100%	105rekening, 29 orang		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa air yang dibayarkan	72 rekening		24 rekening	24 rekening	100%	48 rekening		
		Jumlah tagihan jasa listrik yang dibayarkan	72 rekening		24 rekening	24 rekening	100%	48 rekening		
		Jumlah tagihan jasa telephon yang dibayarkan	12 rekening		12 rekening	12 rekening	100%	21 rekening		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang tersedia	23 orang		29 orang	29 orang	100%	29 orang		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara, Jumlah jenis alat-alat kantor yang terpelihara, Jumlah gedung kantor yang terpelihara	34 unit, 6 jenis, 2 gedung kantor		3 unit, 6 jenis, 6 Jenis, 2 gedung kantor	1 unit,6 unit, 6 Jenis, 2 Gedung	100%	28 unit, 6 jenis,1 gedung kantor		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang terpelihara	4 unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit		

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dan lapangan yang terpelihara	28 unit					28 unit		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dan lapangan yang terpelihara	28 unit		9 unit	9 unit	100%	9 unit		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis alat-alat kantor yang terpelihara	6 jenis		6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis		
	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 gedung kantor		2 gedung kantor	2 gedung kantor	100%	1 gedung kantor		

Sumber : Dinas PerkimLH Tahun 2023

Tabel diatas menggambarkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, sampai dengan triwulan II. Untuk indikator Sasaran dan Program, sebagian besar baru dapat dihitung pada akhir Tahun 2023, sehingga realisasi sampai dengan triwulan II merupakan realisasi Tahun sebelumnya atau Tahun 2022. Sedangkan untuk indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah mulai dilakukan pada triwulan I dan II, namun sebagian besar baru akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III dan IV.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang membawahi dua urusan wajib yaitu urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan minimal di Bidang Perumahan Rakyat adalah:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran untuk 2 unit rehab rumah bagi korban bencana dan 2 unit untuk rehab rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah.

Sementara itu untuk kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup, tidak ada ketentuan pelaksanaan SPM tertentu semenjak Tahun 2014. Namun layanan informasi kualitas lingkungan sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM sebelumnya tetap disediakan melalui berbagai kegiatan terkait.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.2



**Tabel 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**  
**Kota Padang Panjang**

No	INDIKATOR	SPM / standar nasional	IKK	TARGET RENSTRA OPD		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2021	2022	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100% (2024)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100% (2024)		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pengurangan kawasan kumuh		10% (2019)	48,80%	73,95%	56,69%	73,98%	81,76%	89,36%
4	Rasio rumah layak huni			94,96	95,24	96, 70	96,63	95,24	96, 62
5	Persentase permukiman layak huni		90%	94,12%	97,01%	95,02%	97,01%	97,90%	98,80%

6	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard			86	88	84,16%	84,51%	91%	91%
7	Indek Kualitas Lingkungan (IKLH)		69,74 (2024)	65,79- 67,14	72,42	70,47	61,16	72,65	72,87
a.	Indeks Kualitas Air (IKA)		46	41,40- 42,30	55,79	47,89	31,86	55,89	55,99
b.	Indeks Kualitas Udara (IKU)			90 - 93,5	89	91,88	91,07	89,11	89,22
c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			65,26	70,29	69,62	56,18	70,97	71,64
8	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		75%	75%	72%	85,93%	89,65%	73%	72%
9	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan dan/atau SPPL			31	50	31,4	52,4	60	65

Sumber : Dinas PerkimLH Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat target dan realisasi Tahun 2021 dan 2022, serta proyeksi target 2023 dan 2024. Beberapa indikator yang belum memenuhi target pada Tahun 2022 adalah :

1. Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Indeks Kualitas Air.
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan.
5. Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

## **2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Beberapa isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas OPD pada urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

#### **1. Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.**

Dengan luas wilayah secara administratif yang hanya 23 km<sup>2</sup>, diikuti dengan topografi yang didominasi kemiringan lebih dari 40%, menjadi batasan utama dalam pemanfaatan lahan di Kota Padang Panjang, khususnya untuk kegiatan budidaya. Sementara kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

#### **2. Potensi berkembangnya kawasan kumuh perkotaan akibat ketidakteraturan bangunan perumahan.**

Berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Panjang, ditetapkan kawasan kumuh baru di Kota Padang Panjang seluas 47,718 Ha. Sebelumnya dalam Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 050/357/WAKO-PP/2014 Tahun 2014 dimana luas kawasan kumuh adalah sebesar 53,06 Ha, dan telah berhasil dituntaskan sampai Tahun 2020. Dengan munculnya kawasan kumuh baru ini, maka upaya-upaya penataan kawasan permukiman perlu terus dilaksanakan, sekaligus mengantisipasi timbulnya kawasan kumuh baru akibat perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

### **3. Belum Optimalnya Penanganan rumah tidak layak huni.**

Berdasarkan perhitungan Tahun 2022, ratio rumah layak huni di Kota Padang Panjang mencapai 96, 63%. Hal ini berarti masih ada potensi Rumah Tidak Layak Huni sebesar 3, 37%. Sampai Tahun 2022 terdapat 368 unit rumah tidak layak huni. Jumlah ini bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring dengan penambahan jumlah rumah. Apabila tidak ada penanganan lebih lanjut, keberadaan Rumah Tidak Layak Huni berpotensi memunculkan Kawasan Kumuh baru yang dapat berakibat pada penurunan kualitas hidup dan kualitas lingkungan perkotaan. Selain itu jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

### **4. Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan permukiman**

Dengan adanya pertumbuhan penduduk, kebutuhan terhadap perumahan terus meningkat. Penambahan perumahan dan permukiman ini, harus diiringi dengan penyediaan sarana prasarana umum (PSU) yang memadai. Salah satu sarana prasarana umum yang perlu mendapat perhatian yaitu saluran drainase. Curah hujan yang relatif tinggi di Kota Padang Panjang, kecenderungan pola pembangunan yang semakin mengurangi areal resapan air, berpotensi meningkatkan volume air yang harus ditampung oleh badan air terutama saluran drainase. Maka diperlukan upaya pemeliharaan saluran drainase terutama di kawasan permukiman.

## **2.3.2 Urusan Lingkungan Hidup**

Sementara itu untuk urusan lingkungan hidup, beberapa isu strategis yang menyangkut dengan penyelenggaraan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

### **1. Belum optimalnya penanganan pencemaran air permukaan.**

Pada Tahun 2022, Indek Kualitas Air di Kota Padang Panjang berada pada angka 46, 07. Hal ini mengindikasikan tingkat pencemaran air yang masih buruk. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 kualitas air kota padang panjang mengalami peningkatan. Tahun 2021 dari 7 sungai yang ada di padang panjang berada di status cemar sedang, sedangkan Tahun 2022 berdasarkan hasil pengujian, 5 sungai telah berstatus cemar ringan dan 2

sungai berstatus cemar sedang. Walaupun mengalami peningkatan, namun kualitas air sungai masih berada pada kategori “kurang”. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Daerah. Langkah-langkah komprehensif yang terpadu perlu dilakukan dengan seluruh sektor terkait, termasuk mengembangkan kerjasama pengelolaan sungai dengan kabupaten tetangga. Tingkat pencemaran air akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup daerah secara keseluruhan. Dari data indeks kualitas air juga dapat terlihat tingkat ketaatan pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Data hasil pengawasan Tahun 2022 menunjukkan tingkat ketaatan yang masih rendah di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 62,68%.

## **2. Belum Optimalnya penanganan sampah perkotaan**

Sesuai dengan arahan Jakstrada Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, penanganan sampah di Kota Padang Panjang ditargetkan menurun dari tahun ke tahun. Penurunan penanganan ini berkorelasi dengan target pengurangan timbulan sampah dari sumber yang meningkat dari waktu ke waktu. Realisasi pada tahun 2022 menunjukkan penanganan sampah mencapai 82,72% dari target seharusnya sebesar 73%. Realisasi ini menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA relatif masih tinggi dan pengurangan timbulan dari sumber belum terlaksana secara optimal.

Dengan hampir berakhirnya umur pakai TPA Sungai Andok akan berpengaruh terhadap kinerja penanganan sampah Kota Padang Panjang. Apabila tidak didapatkan lokasi baru untuk dijadikan TPA di Kota Padang Panjang, maka pembuangan sampah kota bisa dilakukan ke TPA Regional yang berada di daerah lain. Tentunya untuk dapat melaksanakan opsi tersebut, diperlukan sumber daya yang cukup besar baik dalam hal personil, ketersediaan armada pengumpulan dan pengangkutan serta kemampuan pembiayaan.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 terdiri dari 11 Program, 17 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dengan Pagu Indikatif Rp. 23.554.687.281,- dan dalam

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dengan Pagu Indikatif Rp. 24.552.526.986,-. Terdapat penambahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 997.839.705,-

Penambahan ini untuk mengakomodir usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik yang diperoleh dari hasil musrenbang maupun pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penyesuaian biaya perjalanan dinas, Penyesuaian harga bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas dan operasional, serta penyesuaian harga belanja operasi pelaksanaan kegiatan lainnya.

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan tahun 2023**  
**Kota Padang Panjang**

**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		Catatan Penting
					Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				17.191.892.384	23.492.267.379	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				21.131.908.844	25.445.760.299	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.411.863.264	6.249.062.546	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.354.927.264	6.829.552.180	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.096.841.064	4.856.596.450	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.095.191.064	5.447.139.984	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bln	4.095.191.064	4.856.596.450	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bln	4.095.191.064	5.447.139.984	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun Yang diSusun		850.000						-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Yang diSusun		500.000						-		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran	Padang Panjang	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran yang disusun		300.000						-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				393.588.200	494.345.001	Administrasi Umum Perangkat Daerah				395.050.200	484.291.101	
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	8.320.000	8.869.860	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	21 Paket	7.770.000	10.726.060	

3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	58 Paket	66.689.000	85.605.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	58 Paket	68.489.450	82.134.650
			Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 unit					Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 unit		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah jenis barang cetakan	13 jenis	15.919.200	25.941.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah jenis barang cetakan	13 jenis	16.130.750	17.501.950
			Jumlah Penggandaan yang disediakan	9976 Lembar					Jumlah Penggandaan yang disediakan	9976 Lembar		
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1771 Ok	302.660.000	373.928.441	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1771 Ok	302.660.000	373.928.441
			Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	326 Kali					Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	326 Kali		
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>633.644.000</b>	<b>633.244.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>633.244.000</b>	<b>633.244.000</b>
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan	36 Tagihan	51.932.000	51.532.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan	36 Tagihan	51.532.000	51.532.000
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	16 Orang	581.712.000	581.712.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	16 Orang	581.712.000	581.712.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>287.790.000</b>	<b>264.877.095</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>231.442.000</b>	<b>264.877.095</b>
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan Perorangan dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.724.000	39.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	1 Unit	32.724.000	39.190.000



9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah kegiatan operasional yang dipelihara	12 Unit	121.726.000	159.757.095	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	12 Unit	122.848.000	159.757.095	
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah peralatan dan Mesin yang dipelihara	6 Jenis	36.720.000	25.930.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 Jenis	25.870.000	25.930.000	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	96.620.000	40.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.000.000	40.000.000	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				<b>379.362.980</b>	<b>321.509.280</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				<b>359.904.780</b>	<b>321.509.280</b>	
	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>				<b>110.120.000</b>	<b>83.914.000</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>				<b>104.000.000</b>	<b>83.914.000</b>	
12	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Padang Panjang	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yangTerehabilitasi	5 Unit Rumah	55.060.000	56.940.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Padang Panjang	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yangTerehabilitasi	5 Unit Rumah	52.000.000	56.940.000	
	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit	55.060.000	26.974.000	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit	52.000.000	26.974.000	
			Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit					Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit			

	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>				<b>269.242.980</b>	<b>237.595.280</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>				<b>255.904.780</b>	<b>237.595.280</b>	
13	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	269.242.980	237.595.280	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	255.904.780	237.595.280	
			Jumlah Tenaga Harian Lepas yang Dibayarkan	6 Orang						Jumlah Tenaga Harian Lepas yang Dibayarkan			6 Orang
	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>87.663.300</b>	<b>2.223.143.400</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				<b>1.125.118.166</b>	<b>2.631.718.250</b>	
	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>				<b>87.663.300</b>	<b>2.223.143.400</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>				<b>1.125.118.166</b>	<b>2.631.718.250</b>	
14	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Padang Panjang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	118 Unit Rumah	37.060.000	2.204.425.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Padang Panjang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	118 Unit Rumah	1.096.000.066	2.612.999.850	
			Jumlah rumah yang direhab	25 Unit						Jumlah rumah yang direhab			25 Unit
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	50.603.300	18.718.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Padang Panjang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	29.118.100	18.718.400	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>				<b>356.839.000</b>	<b>3.192.127.663</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>				<b>3.146.907.043</b>	<b>3.838.427.663</b>	
	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>				<b>356.839.000</b>	<b>3.192.127.663</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>				<b>3.146.907.043</b>	<b>3.838.427.663</b>	
16	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Padang Panjang	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman	2 Kecamatan	356.839.000	3.192.127.663	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Padang Panjang	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman	2 Kecamatan	3.146.907.043	3.838.427.663	
			Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman	10 Lokasi						Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman			10 Lokasi

			Jumlah Lokasi Prumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Yang Menunjang Fungsi Hunian	73 Lokasi				Jumlah Lokasi Prumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Yang Menunjang Fungsi Hunian	73 Lokasi				
			Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan perkerasan)	16 Lokasi				Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan perkerasan)	16 Lokasi				
			Jumlah saluran drainase teknis (konstruksi beton)	12 Lokasi				Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan perkerasan) Jumlah saluran drainase teknis (konstruksi beton)	2 Kecamatan 10 Lokasi 73 Lokasi 16 Lokasi 12 Lokasi				
	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>208.953.900</b>	<b>178.321.350</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>304.950.350</b>	<b>127.321.350</b>		
	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>				<b>30.000.000</b>	<b>22.697.600</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>			<b>26.923.450</b>	<b>22.697.600</b>		
17	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	0 Dokumen	30.000.000	22.697.600	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	0 Dokumen	26.923.450	22.697.600	
			jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	1 Dokumen						jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah			1 Dokumen
			Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota yang Disusun	0 Dokumen						Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota yang Disusun			0 Dokumen

	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				178.953.900	155.623.750					278.026.900	104.623.750	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Padang Panjang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	178.953.900	-	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Padang Panjang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	178.026.900	-	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RP JMD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RP JMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	-	155.623.750	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RP JMD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RP JMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000	104.623.750	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>362.498.890</b>	<b>371.610.990</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>354.620.390</b>	<b>329.565.840</b>	
	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>332.511.340</b>	<b>351.981.190</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>325.958.840</b>	<b>309.936.040</b>	
18	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Padang Panjang	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	9 kampung	25.830.000	29.641.600	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Padang Panjang	Jumlah Kampung Iklim yang dibina	9 kampung	25.830.000	26.828.600	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	Padang Panjang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	306.681.340	322.339.590	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	Padang Panjang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	300.128.840	283.107.440	
	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>29.987.550</b>	<b>19.629.800</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>				<b>28.661.550</b>	<b>19.629.800</b>	
19	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Padang Panjang	Data kualitas lingkungan	2 Data	29.987.550	19.629.800	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Padang Panjang	Data kualitas lingkungan	2 Data	28.661.550	19.629.800	
			Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	1 Sungai						Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya			1 Sungai
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>				<b>1.957.961.850</b>	<b>2.009.698.900</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>				<b>2.141.344.851</b>	<b>1.991.553.600</b>	
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1.957.961.850	2.009.698.900	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				2.141.344.851	1.991.553.600	

20	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	29.777.000	-	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	1 Dokumen	28.060.000	-	
21	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Pembuatan Taman	0 Lokasi	1.928.184.850	2.009.698.900	Pengelolaan Ruang TerbukaHijau (RTH)	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Pembuatan Taman	0 Lokasi	2.113.284.851	1.991.553.600	
			Jumlah Lokasi Pemeliharaan Taman	2 Lokasi					Jumlah Lokasi Pemeliharaan Taman	2 Lokasi			
			Jumlah RTH yang Dikelola Lingkungan Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha					Jumlah RTH yang Dikelola Lingkungan Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha			
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>				<b>12.061.000</b>	<b>8.131.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>				<b>9.095.000</b>	<b>8.131.000</b>	
	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>12.061.000</b>	<b>8.131.000</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>9.095.000</b>	<b>8.131.000</b>	
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan,dan/atau Penimbunan	Padang Panjang	Jumlah Fasyankes Penghasil B3 yang Dibina	10 fanyakes	12.061.000	8.131.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan,dan/atau Penimbunan	Padang Panjang	Jumlah Fasyankes Penghasil B3 yang Dibina	10 fanyakes	9.095.000	8.131.000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>				<b>23.052.500</b>	<b>15.553.850</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>				<b>18.822.000</b>	<b>15.553.850</b>	
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>23.052.500</b>	<b>15.553.850</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>18.822.000</b>	<b>15.553.850</b>	

23	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemenintah Daerah Kabupaten/Kota	25 Laporan	23.052.500	15.553.850	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemenintah Daerah Kabupaten/Kota	25 Laporan	18.822.000	15.553.850	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				<b>114.399.950</b>						-		
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota				<b>114.399.950</b>						-		
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota				<b>114.399.950</b>						-		
	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				<b>81.380.000</b>	<b>151.532.000</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				<b>76.350.000</b>	<b>115.149.600</b>	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				<b>81.380.000</b>	<b>151.532.000</b>	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				<b>76.350.000</b>	<b>115.149.600</b>	
24	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan	3 Kali	<b>81.380.000</b>	<b>151.532.000</b>	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan	3 Kali	<b>76.350.000</b>	<b>115.149.600</b>	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Yang Dinilai Kinerjanya Dalam Rangka PPLH	1 Entitas					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Yang Dinilai Kinerjanya Dalam Rangka PPLH	1 Entitas			
			Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	45 Sekolah					Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	45 Sekolah			

	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>				<b>8.195.855.750</b>	<b>8.771.576.400</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>				<b>8.239.869.000</b>	<b>9.237.277.686</b>	
	<b>Pengelolaan Sampah</b>				<b>8.195.855.750</b>	<b>8.771.576.400</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>				<b>8.239.869.000</b>	<b>9.237.277.686</b>	
25	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	177 Ok	5.832.245.250	6.107.514.250	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	177 Ok	5.903.795.750	6.171.040.214	
26	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	4 kali	20.000.000	19.541.600	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	4 kali	19.640.000	19.541.600	
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Sampah Sesuai Dengan Rencana induk Pengelolaan	0 Dokumen	696.292.000	1.487.336.750	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1.562.383.250	1.523.347.936	
			Jenis prasarana persampahan yang tersedia dan dipelihara	4 Jenis					Jenis prasarana persampahan yang tersedia dan dipelihara	4 Jenis			
29	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA	1.647.318.500	1.157.183.800	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA	754.050.000	1.523.347.936	

Sumber : Dinas PerkimLH Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat perbandingan pagu anggaran Program, Kekuatan dan Sub Kegiatan untuk Renja Perubahan 2023 ketika rancangan awal renja perubahan dan rancangan akhir renja perubahan.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi maupun perguruan tinggi. Usulan tersebut berupa usulan Musrenbang dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 terdapat beberapa tambahan usulan pikir yang diakomodir melalui Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian dan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Usulan tersebut diantaranya :

1. Pembangunan/perbaikan drainase (Trotuar) lingkungan Kel. Pasar Usang
2. Pembangunan/perbaikan DAM/Tebing Lingkungan Jl. Sutan Syahrir RT. 13, Perumahan Silaiang Permai, Kel. Silaiang Bawah.
3. Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan, RT. 2 Kelurahan Silaiang Bawah.
4. Pembangunan/perbaikan fasilitas umum lingkungan RT. 13 Kel. Silaiang Bawah.
5. Pembangunan Perbaikan DAM/Tebing lingkungan RT. 18 Kel. Kampung Manggis.
6. Pembangunan/perbaikan DAM/ Tebing lingkungan RT.2 Kel. Tanah Hitam.
7. Pembangunan/perbaikan jalan lingkungan RT. 12 Kampung Teleng Kel. Kampung Manggis.
8. Pembangunan/Perbaikan DAM/Tebing lingkungan Belakang Musholla Assalam gang Puti bungsu RT. 22 Kel. Silaiang Bawah.
9. Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan Musholla Assalam gang Puti bungsu RT. 22 Kel. Silaiang Bawah.
10. Pembangunan/perbaikan Fasilitas Umum Lingkungan Jl. St. Syahrir gang sepakat RT. 14 Kel. Silaiang Bawah



11. Pembangunan/Perbaikan DAM/Tebing Lingkungan RT. 1 Kel. Bukit Surungan
12. Pembangunan/Perbaikan DAM/Tebing Lingkungan RT. 012 Kel. Kampung Manggis.

Usulan untuk sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diantaranya :

1. Bantuan bedah rumah an. Ronal Fefi Andri
2. Bantuan bedah rumah an. Martini
3. Bantuan bedah rumah an. Rahmat Hidayat
4. Bantuan bedah rumah an. Kasmi
5. Bantuan bedah rumah an. Iskandar
6. Bantuan bedah rumah an. Suratmi
7. Bantuan bedah rumah an. Murniati
8. Bantuan bedah rumah an. Delfi Yanti Zulkarnain
9. Bantuan bedah rumah an. Mainar
10. Bantuan bedah rumah an. Syafruddin
11. Bantuan bedah rumah an. Kartini
12. Bantuan bedah rumah an. Alfian Joni
13. Bantuan bedah rumah an. Darmawati
14. Bantuan bedah rumah an. Eni Warni
15. Bantuan bedah rumah an. Susi Gusmanti
16. Bantuan bedah rumah an. Desniwati

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Renja Perubahan Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Beberapa indikator pada prioritas dan sasaran pembangunan tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal di Daerah yaitu (1) Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni; dan (2) Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Target capaian dari masing-masing indikator tersebut pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Untuk dapat mewujudkan target tersebut Pemerintah Daerah perlu menyiapkan beberapa alternatif kebijakan diantaranya penyediaan hunian baru pelaksanaan rehabilitasi hunian atau penyediaan penampungan sementara yang layak huni.

Dalam hal penanganan kawasan kumuh, di Kota Padang Panjang telah ditetapkan kawasan kumuh seluas 47,718 Ha melalui Keputusan Walikota Nomor 189 Tahun 2020. Oleh karena itu kebijakan penanganan kawasan ini secara terpadu dan berkesinambungan perlu dilakukan untuk dapat dituntaskan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam hal memenuhi ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat, Pemerintah Kota Padang Panjang juga perlu menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan Nasional yakni meningkatkan jumlah rumah layak huni. Jika secara nasional ditargetkan pengurangan rumah tidak layak huni mencapai 118.960 unit pada Tahun 2022, maka Kota Padang Panjang juga perlu menerapkan kebijakan serupa di level daerah yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Kondisi sampai dengan akhir Tahun 2022 menunjukkan data jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang sebanyak 368 unit. Tahun 2023 ini dialokasikan bantuan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 105 unit pada DPA awal.

Sementara itu dengan ditetapkannya target nasional berupa peningkatan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman sebesar 100% pada Tahun 2023, maka daerah perlu mendukungnya dengan menyiapkan kebijakan berupa pembangunan PSU baru maupun peningkatan kualitas PSU yang telah tersedia.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan Kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Menurunnya kawasan kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	Persentase pengurangan kawasan kumuh	83%	
3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio Rumah layak huni	56, 93%	
4	Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Nasional Urusan Lingkungan Hidup

No.	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,48 poin	Daerah menyesuaikan besaran

2	Meningkatnya penanggungjawab usaha yang taat terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	68%	Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan Kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
3	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah, meliputi :  a. Persentase pengurangan timbulan sampah  c. Persentase penanganan timbulan sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota, meliputi:  b. Persentase pengurangan timbulan sampah  d. Persentase penanganan timbulan sampah	11,18  31,41	

Untuk urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020. Terdapat prioritas nasional yang terkait dengan KLHK, arah kebijakan dan strategi dalam prioritas tersebut terdiri dari 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan 3) pembangunan rendah karbon.

Sementara untuk Tahun 2022, prioritas pembangunan nasional pada urusan lingkungan hidup mengarah pada 3 kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih menjadi prioritas yang muncul setiap tahunnya. Kebijakan ini diperlukan sebagai fungsi kontrol terhadap munculnya dampak akibat pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Target IKLH nasional yang ditetapkan sebesar 69,22 poin, harus dicapai dengan memastikan perbaikan terhadap kualitas air, udara dan lahan. Untuk Kota Padang Panjang, berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan, maka prioritas utama perlu diarahkan pada perbaikan kualitas air.

Peningkatan kualitas lingkungan tidak bisa terlepas dari peran berbagai *stakeholder*. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap kondisi kualitas lingkungan. Ada sejumlah indikator yang perlu dipantau melalui instrumen izin lingkungan, izin PPLH ataupun izin lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu disiapkan berbagai upaya yang dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap ketentuan perizinan lingkungan.

Kinerja berikutnya yang menjadi prioritas pada pembangunan nasional adalah pengelolaan persampahan. Sejalan dengan telah ditetapkannya kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) dibidang persampahan, maka fokus pengelolaan sampah diarahkan pada penurunan timbulan dan penanganan sampah. Kota Padang Panjang pada Tahun 2018 telah menyikapi kebijakan tersebut melalui penetapan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk Tahun 2023

ditargetkan pengurangan timbulan sampah sebesar 26% dan penanganan sampah sebesar 73%.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

Mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut :

#### **1) Tujuan**

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan
2. Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Tujuan diatas sejalan dengan sasaran pada RPJMD 2018-2023 yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian Misi Pertama **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan** dan Misi Kedua **Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya.**

#### **2) Sasaran**

Tujuan pertama dijabarkan menjadi dua sasaran yaitu :

- (1) Meningkatnya Kualitas lingkungan permukiman; dan
- (2) Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan.

Tujuan kedua terdiri dari satu sasaran yaitu:

- (1) (3) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

Sementara Tujuan ketiga terdiri dari satu sasaran yaitu :

- (2) Meningkatnya cakupan layanan pencegahan stunting dari Urusan Lingkungan Hidup

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang muncul pada Renja Perubahan Tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada dasarnya sama dengan Program dan Kegiatan yang ada pada Renja Tahun 2023.

Terkait visi dan misi Walikota, salah satu sasaran pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan adalah meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dengan indikator persentase kenaikan indeks kualitas layanan infrastruktur (IKLI) dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Menyikapi kebijakan tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyusun Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk mendukung pencapaian target IKLI. Sementara untuk mendukung capaian target IKLH program yang disiapkan adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Pengelolaan Persampahan.

Selain mendukung pencapaian target IKLH, pada keempat program tersebut juga diarahkan untuk mendukung capaian target Kebijakan Nasional pada Urusan Lingkungan Hidup yang mencakup peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan pembangunan rendah karbon.

Sasaran selanjutnya yang dikembangkan dari visi misi Walikota adalah Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sasaran ini ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melalui Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan prioritas utamanya adalah pembinaan pengelolaan Limbah B3 untuk fasyankes.

Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan. Sasaran ini dirindaklanjuti oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melalui Program Pengembangan Perumahan dan Program Kawasan Permukiman dengan prioritas utamanya adalah rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini sekaligus juga mendukung tujuan 1 dari SDGs/TPB yaitu tanpa kemiskinan.



Secara keseluruhan, jumlah program yang diajukan dalam Renja Perubahan Tahun 2023 adalah sebanyak 11 program yang terdiri dari 1 program rutin kesekretariatan, 3 program teknis urusan perumahan rakyat dan 8 program yang terkait urusan lingkungan hidup.

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN**  
**PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang untuk Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Anggaran awal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 23. 558.267.679,-. Pengajuan di Renja Perubahan adalah sebesar Rp. 25.043.905.722,- dengan penambahan sebesar Rp. 1.485.638.043,-

Pengajuan penambahan ini untuk mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kegiatan sampai akhir Tahun 2023. Diantaranya penyesuaian gaji, penyesuaian kenaikan harga BBM, mengakomodir usulan pokok pikiran anggota Dewan serta penyesuaian belanja operasi.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023												
Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup												
Kota Padang Panjang												
Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2023		DPA Awal	Renja 2023 Perubahan	Target		Pagu Indikatif			
			Semula	Menjadi								
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			12.787.212.338	13.585.516.632			7.169.775.650		
1 04 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	90 %	6.167.015.245	6.793.861.439		90 %	5.427.845.705	
1 04 1	02:02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	100 %	100 %	4.856.596.450	5.447.139.984		100 %	4.096.841.064	
1 04 1	02:02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	48 Orang/bulan	4.856.596.450	5.447.139.984	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 Orang/bulan	4.095.191.064	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 04 1	02:06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90 %	90 %	445.345.000	448.600.360		90 %	466.318.641	
1 04 1	02:06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	25 Paket	7.762.200	8.869.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	21 Paket	7.770.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 04 1	02:06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	58 Paket	58 Paket	84.678.300	86.826.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	58 Paket	68.489.450	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11 Paket				0 Paket		
				Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 Unit	2 Unit				2 Unit		
1 04 1	02:06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	13 Jenis	13 Jenis	22.839.500	22.839.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Jenis	16.130.750	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket				0 Paket		
				Jumlah penggandaan yang disediakan	9976 Lembar	9976 Lembar				9976 Lembar		
1 04 1	02:06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		326 Laporan	330.065.000	330.065.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	373.928.441	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1033 Ok	1771 Ok				1771 Ok		
				Jumlah rapat - rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	138 kali	326 kali				326 kali		
1 04 1	02:08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	633.244.000	633.244.000		100 %	633.244.000	
1 04 1	02:08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan	60 tagihan	60 tagihan	51.532.000	51.532.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 tagihan	51.532.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		60 Laporan				0 Laporan		
1 04 1	02:08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	581.712.000	581.712.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	581.712.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	16 Orang	20 Orang				16 Orang		

1	04	1	02:09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan	90 %	90 %	231.829.795	264.877.095		90 %	231.442.000	
1	04	1	02:09	001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	42.724.000	39.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	32.724.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	1	02:09	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	0 Unit 9 Unit	12 Unit 12 Unit	123.175.795	159.757.095	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Unit 12 Unit	122.848.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	1	02:09	006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis	9 Unit	25.930.000	25.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Jenis	25.870.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	1	02:09	009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	40.000.000	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	50.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	2		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Rasio Rumah Layak Huni</b>	<b>97,10 %</b>	<b>97,10 %</b>	<b>321.509.280</b>	<b>321.509.280</b>		<b>97,10 %</b>	<b>359.904.780</b>	
1	04	2	02:03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun	5 rumah	5 rumah	83.914.000	83.914.000		5 rumah	104.000.000	
1	04	2	02:03	001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	2 Unit Rumah	56.940.000	56.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit Rumah	52.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	2	02:03	005 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit Rumah	2 Unit Rumah	26.974.000	26.974.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit Rumah	52.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	2	02:05	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian	72 hunian	237.595.280	237.595.280		72 hunian	255.904.780	
1	04	2	02:05	001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	1 Laporan - 6 Orang	72 hunian 1 Laporan 6 Orang	237.595.280	237.595.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	72 hunian 0 Laporan 6 Orang	255.904.780	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	3		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase pengurangan kawasan kumuh</b>	<b>40 %</b>	<b>40 %</b>	<b>2.203.310.150</b>	<b>2.631.718.250</b>		<b>40 %</b>	<b>1.125.118.165</b>	
1	04	3	02:03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)	43 unit	43 unit	2.203.310.150	2.631.718.250		43 unit	1.125.118.165	
1	04	3	02:03	002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Jumlah rumah yang direhab	- 25 Unit	126 Unit Rumah -	2.174.999.750	2.612.999.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	126 Unit Rumah 0 Unit	1.096.000.065	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	3	02:03	004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	- 1 Laporan	10 kali 1 Laporan	28.310.400	18.718.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 kali 0 Laporan	29.118.100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

1	04	5			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard</b>	<b>91 %</b>	<b>91 %</b>	<b>4.095.377.663</b>	<b>3.838.427.663</b>		<b>91 %</b>	<b>256.907.000</b>	
1	04	5	02:01		<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Jumlah jenis PSU yang tersedia</b>	<b>3 %</b>	<b>3 %</b>	<b>4.095.377.663</b>	<b>3.838.427.663</b>		<b>3 %</b>	<b>256.907.000</b>	
1	04	5	02:01	002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman	2 Kecamatan	2 Kecamatan	4.095.377.663	3.838.427.663	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Kecamatan	256.907.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengamanan	10 Lokasi	10 Lokasi				10 Lokasi		
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		38 Lokasi				0 Lokasi		
						Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan Perkerasan)	16 Lokasi	16 Lokasi				16 Lokasi		
						Jumlah saluran drainase teknis (konstruksi beton)	12 Lokasi	12 Lokasi				12 Lokasi		
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2	11				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>11.674.305.341</b>	<b>11.458.389.090</b>				<b>11.123.370.290</b>	
2	11	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan lingkungan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>291.771.850</b>	<b>127.321.650</b>		<b>100 %</b>	<b>354.129.100</b>	
2	11	2	02:01		<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, Jumlah dokumen DDDT yang direvisi</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>22.697.900</b>	<b>22.697.900</b>		<b>2 Dokumen</b>	<b>26.923.450</b>	
2	11	2	02:01	001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen DDDT yang direvisi	1 Dokumen	-	22.697.900	22.697.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	26.923.450	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		
						Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	-				0 Dokumen		
2	11	2	02:02		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen KLHS Revisi RTRW, Jumlah KLHS Perubahan RPJMD</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>269.073.950</b>	<b>104.623.750</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>327.205.650</b>	
2	11	2	02:02	001	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	164.450.200	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	178.026.900	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	02:02	002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	104.623.750	104.623.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	149.178.750	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan</b>	<b>14,29 %</b>	<b>14,29 %</b>	<b>346.073.390</b>	<b>329.565.840</b>		<b>14,29 %</b>	<b>354.620.390</b>	
2	11	3	02:01		<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jenis hasil uji</b>	<b>2 jenis</b>	<b>2 jenis</b>	<b>317.413.040</b>	<b>309.936.040</b>		<b>2 jenis</b>	<b>325.958.840</b>	
						<b>Jumlah Kampung Iklim yang dibina</b>	<b>9 kampung</b>	<b>9 kampung</b>				<b>9 kampung</b>		
2	11	3	02:01	002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 dokumen	20.269.000	26.828.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	25.830.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah kampung iklim yang dibina	9 kampung	9 kampung				9 kampung		
2	11	3	02:01	003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis hasil uji	2 Jenis	2 Jenis	297.144.040	283.107.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Jenis	300.128.840	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		2 Dokumen				0 Dokumen		

2	11	3	02:02	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Data kualitas lingkungan	2 data	2 data	28.660.350	19.629.800		2 data	28.661.550	
					Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarannya	1 sungai	1 sungai				1 sungai		
2	11	3	02:02	001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Data kualitas lingkungan	2 Data	2 Data	28.660.350	19.629.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Data	28.661.550	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		0 Laporan				0 Laporan		
					Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarannya	1 Sungai	1 Sungai				1 Sungai		
2	11	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah lokasi pemeliharaan taman		100 %	2.068.438.101	1.991.553.600		100 %	1.956.084.850	
					Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	100 %	100 %				100 %		
2	11	4	02:01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pemeliharaan taman	1 Dokumen	2 Kecamatan	2.068.438.101	1.991.553.600		2 kecamatan	1.956.084.850	
2	11	4	02:01	001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	28.060.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	02:01	004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi pembuatan taman	2 lokasi	0 lokasi	2.068.438.101	1.991.553.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 lokasi	1.928.024.850	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah lokasi pemeliharaan taman	4 Lokasi	2 kecamatan				2 kecamatan		
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Ha	53 Ha				0 Ha		
2	11	5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes (jil fasyankes yang mengelola limbah/penghasil limbah)	31-35 %	31-35 %	9.091.000	8.131.000		31-35 %	9.095.000	
2	11	5	02:02	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina	10 Fasyankes	10 Fasyankes	9.091.000	8.131.000		10 Fasyankes	9.095.000	
2	11	5	02:02	002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		1 Dokumen	9.091.000	8.131.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	9.095.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah fasyankes penghasil B3 yang dibina	10 lokasi	10 fasyankes				10 fasyankes		
2	11	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	65 %	65 %	16.122.850	15.553.850		65 %	18.822.000	
2	11	6	02:01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	110 Kegiatan	25 Kegiatan	16.122.850	15.553.850		25 Kegiatan	18.822.000	

2	11	6	02:01	003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		25 Laporan		16.122.850	15.553.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Laporan	18.822.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	25 Laporan	25 Kegiatan					25 Kegiatan		
2	11	9			<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>2 Jenis</b>		<b>71.694.600</b>	<b>115.149.600</b>		<b>2 Jenis</b>	<b>76.350.000</b>	
2	11	9	02:01		<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup</b>	<b>3 Kali</b>	<b>0 jenis</b>		<b>71.694.600</b>	<b>115.149.600</b>		<b>0 jenis</b>	<b>76.350.000</b>	
						<b>Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina</b>	<b>40 Sekolah</b>	<b>45 sekolah</b>					<b>45 sekolah</b>		
2	11	9	02:01	001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali		71.694.600	115.149.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Kali	76.350.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	1 Entitas					1 Entitas		
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		1 Entitas					1 Entitas		
						Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina	45 Sekolah	45 Sekolah					45 Sekolah		
2	11	#			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga</b>	<b>72 %</b>	<b>72 %</b>		<b>8.871.113.550</b>	<b>8.871.113.550</b>		<b>72 %</b>	<b>8.239.869.000</b>	
						<b>Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga</b>	<b>28 %</b>	<b>28 %</b>					<b>28 %</b>		
2	11	#	02:01		<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	<b>Jenis sarana prasarana persampahan</b>	<b>3 jenis</b>	<b>3 jenis</b>		<b>8.871.113.550</b>	<b>8.871.113.550</b>		<b>3 jenis</b>	<b>8.239.869.000</b>	
						<b>Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat</b>	<b>3 kali</b>	<b>3 kali</b>					<b>3 kali</b>		
						<b>Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada</b>	<b>2 laporan</b>	<b>2 laporan</b>					<b>2 laporan</b>		
						<b>Jumlah lokasi penyediaan lahan untuk pengolahan sampah</b>	<b>1 lokasi</b>	<b>1 lokasi</b>					<b>1 lokasi</b>		
						<b>Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan</b>	<b>183 Orang</b>	<b>177 Orang</b>					<b>177 Orang</b>		
						<b>Jumlah TPA yang dipelihara</b>	<b>1 TPA</b>	<b>1 TPA</b>					<b>1 TPA</b>		
2	11	#	02:01	003	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja kebersihan Kota yang dipekerjakan	183 Orang	177 Orang		5.951.881.800	6.171.040.214	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	177 Orang	5.903.795.750	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		12.498 Ton					0 Ton		
2	11	#	02:01	004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	4 kali	3 kali		19.563.600	19.541.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 kali	19.640.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		7 Kelompok					0 Kelompok		

2	11	#	02:01	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1 Dokumen	1.776.364.350	1.523.347.936	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Dokumen	1.562.383.250	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah jenis prasarana persampahan yang tersedia dan dipelihara	4 Jenis	4 Jenis					4 Jenis		
2	11	#	02:01	007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		21 Unit	1.123.303.800	1.157.183.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Unit	754.050.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA	1 TPA					1 TPA		
<b>Jumlah</b>									24.461.517.679	25.043.905.722			18.293.145.940	

Sumber : Dinas PerkimLH Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan pada Rancangan akhir Renja Perubahan Tahun 2023, serta indikator pada renja Tahun 2023 dan pada rancangan akhir perubahan renja Tahun 2023.



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023 digunakan sebagai acuan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup. Dokumen ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD 2023 dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang.

Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023 selain berisi program dan rencana kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan dan indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian rencana kerja yang telah disusun.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup.

Padang Panjang,      September 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA PADANG PANJANG**

  
**ALWI SENA, ST, MT**  
**NIP. 19750825 200212 1 004**